

EDISI : SELASA, 09 - April 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pendidikan

Terganjil Jaringan Internet

# Tiga SMP di Busungbiu Belum Bisa Gelar UNBK

Singaraja (Bali Post) -

Tiga SMP di Kecamatan Busungbiu dipastikan tidak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 ini. Penyebabnya, lantaran lokasi tiga sekolah itu tidak terjangkau jaringan internet. Atas fakta ini, siswa di ketiga sekolah itu, harus puas mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

Dari data yang dihimpun di lapangan Senin (8/4) kemarin, sekolah yang lokasinya di aeral *blank spot* adalah SMPN 2 Busungbiu. Sekolah di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu ini berada di Jalan Pupuan-Pekutatan. Tidak jauh dari sekolah itu, ada dua tower telepon seluler. Anehnya, tidak ada *provider* yang mampu menyediakan koneksi internet agar cepat dan stabil di kawasan itu.

Kepala SMPN 2 Busungbiu Made Kariadi mengatakan, sejak kebijakan UNBK itu digulirkan, pihaknya ingin menggelar UNBK di sekolahnya. Tim dari Dinas Pendi-

kan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melakukan penjajakan ke sekolahnya untuk mempersiapkan fasilitas komputer di sekolah itu. Dari perencananya itu, SMPN 2 Busungbiu akan mendapat bantuan komputer untuk kebutuhan dua kelas. Menyusul rencana itu, siswa sudah sangat siap mengikuti UNBK. Sayangnya, karena fasilitas tidak siap, 130 siswa kelas IX terpaksa mengikuti (UNKP) tahun ini.

"Kalau ruang dan daya listrik kami siap. Rupanya modal itu tidak cukup, sebab daerah itu belum terjangkau sinyal internet dengan cepat

dan stabil. Mudah-mudahan program Pemprov Bali tentang Bali Smart itu terwujud, sinyal internet bisa masuk sekolah kami, sehingga UNBK dapat digelar," harap Made Kariadi.

Persoalan sama juga terjadi di SMPN 3 Busungbiu. Siswa di sekolah yang berada di Desa Sepang itu, belum bisa mengikuti UNBK tahun ini. Selain itu, SMPN 5 Busungbiu di Desa Pucaksari juga terpaksa masih melaksanakan UNKP. Pasalnya itu tadi ada masalah sinyal internet. Hal itu membuat siswa di sekolah ini tidak bisa mengikuti UNBK.

Sekretaris Disdikpora

Buleleng I Made Astika mengakui kalau masih ada sekolah di daerahnya belum bisa melaksanakan UNBK tahun ini. Bukan saja masalah jaringan internet, kata Astika, tetapi kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan sekolah itu tidak bisa melaksanakan UNBK. Dia mencontohkan, gara-gara koneksi internet yang belum siap, pengadaan perangkat komputer SMPN 2 Busungbiu ditunda. Untuk mempercepat masalah ini, Astika berharap Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Kominfosandi) memecahkan masalah ini. "Kalau jaringan internet bagus, ruangan komputer ada, maka kami pastikan akan dapat bantuan perangkat UNBK, tetapi karena daerahnya *blank spot*, otomatis bantuan komputer UNBKnya ditunda," katanya. (kmb38)



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **BALI POST**

Kategori : **Pajak**

# Sikapi Pengurangan Keberatan PBB P2 Sesuai Prinsip Kepatutan dan Keadilan

**Singaraja (Bali Post) -**

Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng mulai mengkaji pengajuan keberatan Wajib Pajak (WP) atas kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) tahun 2019. Dari kajian awal terungkap, keberatan yang diajukan itu segera ditindaklanjuti. Keputusan pengurangan pajak. Pengurangan itu berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan. Ini karena, regulasi yang sudah direvisi itu sudah diundangkan, sehingga aturan itu wajib dilaksanakan.

Demikian terungkap dalam koordinasi antara BKD, Bagian Hukum, dan Inspektorat Daerah Buleleng pada rapat BKD Buleleng,

Senin (8/4) kemarin. Rapat dipimpin Sekretaris BKD Ni Made Susi Adnyani mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD Gede Suyasa.

Susi Adnyani mengatakan, dari pembahasan awal BKD baru menyusun draf pengurangan. Draft yang disusun itu menindaklanjuti keberatan yang diajukan wajib pajak. Penyusunan draf ini berdasarkan pertimbangan yang memenuhi prinsip kepatutan dan berkeadilan terhadap regulasi yang mengatur.

Ini karena, pungutan PBB P2 berdasarkan undang-undang (UU) diikuti peraturan daerah (perda) dan turunan regulasi lainnya. Regulasi ini sudah diundangkan, sehingga wajib

diterapkan. Selain itu, BKD menempuh upaya untuk berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini karena saat pembahasan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) terdahulu, BKD difasilitasi lembaga itu. Karena itu, draf pengurangan ini perlu dikordinasikan agar keputusan yang akan diambil nantinya tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

"Kami baru melakukan rapat awal. Pada dasarnya, setiap keberatan itu kita tindak lanjuti. Keputusan dalam penetapan keberatan pajak itu sesuai prinsip kepatutan dan berkeadilan," katanya.

Menurut Susi, sejak Surat Pemberitahuan Pajak Teru-

tang (SPPT) didistribusikan ke setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap kecamatan, pihaknya telah menerima beberapa jenis keberatan. Secara detail berapa wajib pajak yang mengajukan keberatan belum dirinci.

Meski demikian, Susi menyebut kebanyakan wajib pajak itu keberatan atas kenaikan NJOP. Sedangkan, keberatan karena nilai pajaknya naik dibandingkan tagihan pajak tahun terdahulu belum banyak yang masuk ke BKD.

"Umumnya, keberatan kenaikan NJOP dan keberatan PBB-nya naik belum banyak. Ini masih berproses paling lambat seminggu ini sudah ada keputusan pengurangan pajak," jelasnya. (kmb38)

Nama Media : *BALI POST*

Kategori : *APBD*

# LKPJ APBD 2018 Realisasi BKK Nol Persen

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018 mulai dibahas DPRD Buleleng. Dari pembahasan tingkat komisi, terungkap pos dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Badung itu realisasinya justru nol persen. Padahal, dalam APBD program itu, dianggarkan dengan nilai total lebih dari Rp 22,5 miliar. Sejak ditetapkan anggaran itu sebetulnya merupakan BKK. Namun, penjabaran di APBD dana itu justru berubah menjadi bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Mengapa bisa realisasi BKK itu justru nol persen, malah berubah menjadi Bansos uang tunai?

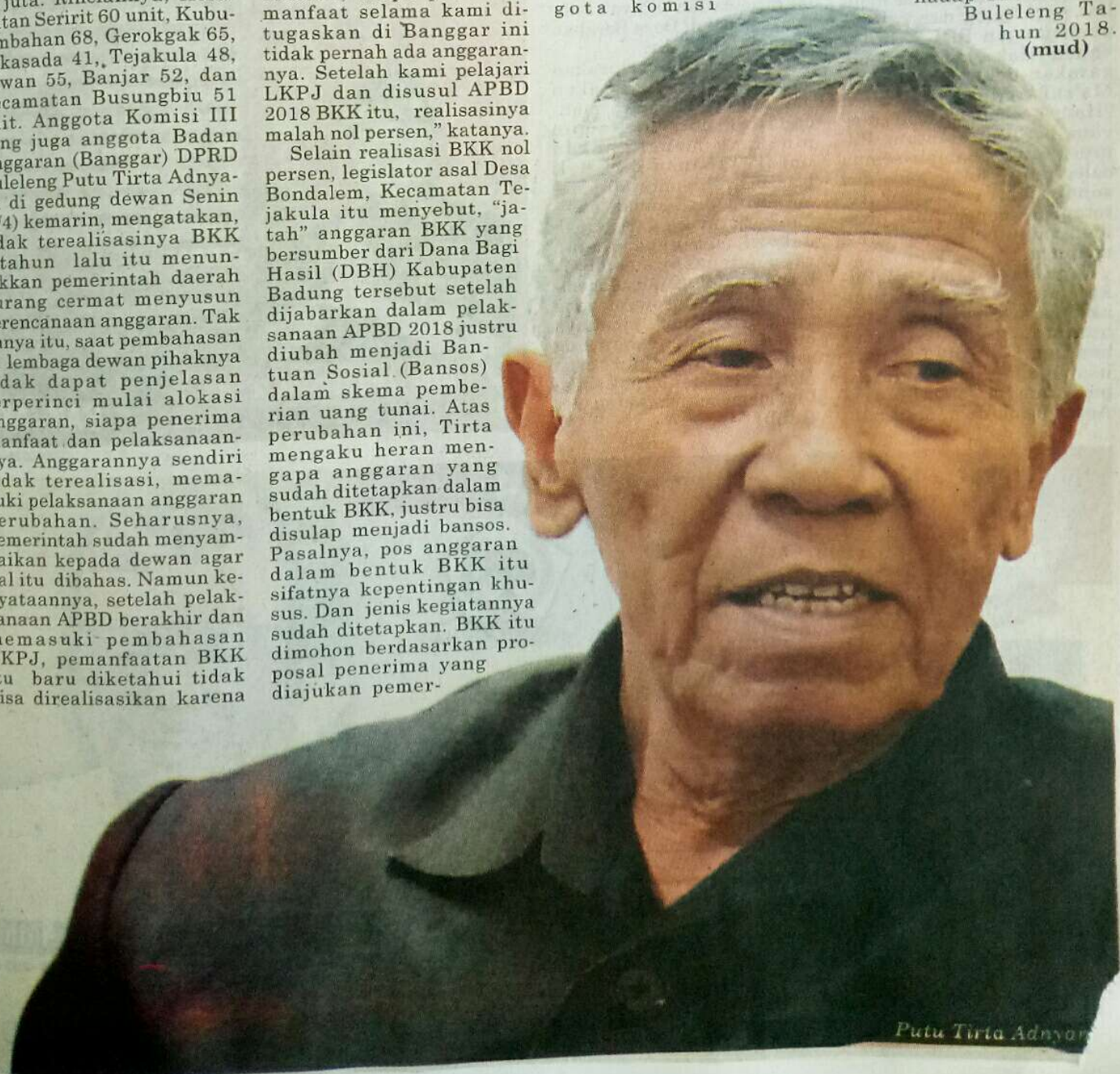
NILAI bansos yang diberikan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) penerima itu sebanyak Rp 50 juta. Rinciannya, Kecamatan Seririt 60 unit, Kubutambahan 68, Gerokgak 65, Sukasada 41, Tejakula 48, Sawan 55, Banjar 52, dan Kecamatan Busungbiu 51 unit. Anggota Komisi III yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana di gedung dewan Senin (8/4) kemarin, mengatakan, tidak terealisasinya BKK setahun lalu itu menunjukkan pemerintah daerah kurang cermat menyusun perencanaan anggaran. Tak hanya itu, saat pembahasan di lembaga dewan pihaknya tidak dapat penjelasan terperinci mulai alokasi anggaran, siapa penerima manfaat dan pelaksanaannya. Anggarannya sendiri tidak terealisasi, memasuki pelaksanaan anggaran perubahan. Seharusnya, pemerintah sudah menyampaikan kepada dewan agar hal itu dibahas. Namun kenyataannya, setelah pelaksanaan APBD berakhir dan memasuki pembahasan LKPJ, pemanfaatan BKK itu baru diketahui tidak bisa direalisasikan karena

nol persen. "Perencanaan anggaran di APBD 2018 itu dican-tumkan. Bagaimana pelaksanaan, siapa penerima manfaat selama kami ditugaskan di Banggar ini tidak pernah ada anggarannya. Setelah kami pelajari LKPJ dan disusul APBD 2018 BKK itu, realisasinya malah nol persen," katanya. Selain realisasi BKK nol persen, legislator asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula itu menyebut, "jatuh" anggaran BKK yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Badung tersebut setelah dijabarkan dalam pelaksanaan APBD 2018 justru diubah menjadi Bantuan Sosial (Bansos) dalam skema pemberian uang tunai. Atas perubahan ini, Tirta mengaku heran mengapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam bentuk BKK, justru bisa disulap menjadi bansos. Pasalnya, pos anggaran dalam bentuk BKK itu sifatnya kepentingan khusus. Dan jenis kegiatannya sudah ditetapkan. BKK itu dimohon berdasarkan proposal penerima yang diajukan pemer-

intah daerah. Sedangkan mekanisme bansos itu sifat bantuannya tidak dilakukan secara terus menerus. Penentuan siapa pihak yang berhak menerimanya ditentukan secara selektif. "Kalau di perencanaan dan penjabaran APBD tercantum BKK, tetapi dalam LKPJ lalu berubah menjadi bansos. Saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Itu baru saya ketahui setelah membaca dokumen keuangan ini," katanya.

Di sisi lain, Tirta Adnyana mengatakan, setelah membahas dengan anggota komisi

dan tim pakar, kata Tirta Adnyana, realisasi BKK nol persen. Perubahannya BKK itu menjadi bansos itu dipertanyakan dalam jadwal pembahasan LKPJ selanjutnya. Setelah pembahasan ditingkat komisi bersama tim pakar, pembahasan berlanjut di tingkat gabungan komisi-komisi. Poin pertanyaan dari pihak komisi yang membidangi itu dipertanyakan dalam pembahasan bersama eksekutif. Sedangkan, pembahasan final dijadwalkan 26 April 2019. Dewan akan menerbitkan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng Tahun 2018. (mud)



Putu Tirta Adnyana



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **BALI POST**

Kategori : **PERKAMANAN T**

### 898 Personel Amankan 2.146 TPS

**Singaraja (Bali Post) –**

Persiapan pengamanan terus ditingkatkan seiring kian dekatnya pencoblosan dan penghitungan suara pada laga Pemilu 17 April 2019. Untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemilu, 898 personel pengamanan ambil bagian dalam pembekalan akhir pekan lalu. Mereka akan bertugas mengamankan 2.146 TPS di Buleleng. Sedangkan, materi pembekalan itu dibawakan Kapolres Buleleng AKBP Suratno, bersama Ketua Badan

Pengawas Pemilu Putu Sugi Ardana, dan Perwakilan KPU Buleleng.

Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. mengatakan, untuk mengamankan pencoblosan dan penghitungan suara, ratusan personel itu ditugaskan melakukan pengamanan di 2.146 lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Buleleng. Selain pelatihan tentang teknis pengamanan sesuai prosedur tetap (protap) dari pimpinan, personel pengamanan juga diberikan pemahaman tentang pemilu.

Ini penting agar setiap personel pengamanan ini mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan demikian, saat pencoblosan dan penghitungan suara situasi kamtibmas tetap kondusif. Artinya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sejak awal tahapan sampai mendekati hari H, situasi di daerah masih kondusif. Situasi ini harus dijaga dengan baik sampai pemilu berakhir menghasilkan para pemimpin bangsa sesuai pilihan rakyat,” katanya. (kmb38)

Nama Media : *BALI POST*

Kategori : *LAKALANTAS*



Bali Post/kmb38

**TABRAK TEBING** - *Hindari mobil lain, bus nopol AG 7005 UV yang dikemudikan Gede Suka Laksana akhirnya menabrak tebing di Pancasari.*

## Hindari Mobil Lain Bus Tabrak Tebing di Pancasari

**Singaraja (Bali Post) -**

Bus dengan nomor polisi (nopol) AG 7005 UV mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) ketika melintas di Jalan Singaraja - Bedugul Km 22 Dusun Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Senin (8/4) kemarin. Ketika melintas di lokasi kejadian, bus itu kehilangan kendali. Menghindari menabrak kendaraan lainnya, bus itu akhirnya justru ditabrakkan ke tebing di pinggir jalan.

Kasat Lantas AKP Putu Diah Kurniawandari seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno mengatakan bus itu dikemudikan Gede Suka Laksana (49) asal Desa Mekar Sari, Kecamatan Putra Rumbia, Lampung. Bus

itu melintas dari arah Singaraja menuju Denpasar. Setelah melewati tikungan tajam dan memasuki lokasi kejadian, tiba-tiba bus itu kehilangan kendali.

Sebetulnya pengemudi bus itu sudah mencoba menghentikan laju kendaraannya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lainnya yang datang dari arah berlawanan. Namun, kemudian pengemudi nekat menabrakkan ke tebing sehingga bagian depan kiri bus itu rusak. Bus akhirnya berhenti setelah bagian depan bus itu membentur tebing terjal. Atas peristiwa itu pengemudi bus dalam kondisi sehat. Demikian juga sarana-prasana jalan di lokasi itu tidak ada yang

rusak, sehingga kasus ini tidak dilakukan penanganan lebih lanjut.

"Dari laporan Unit Lakalantas di Pos Polisi Pancasari benar terjadi lakalantas. Saat bus itu memasuki tanjakan justru tidak bisa dikendalikan. Kemudian pengemudi ingin menghentikan kendaraan agar tidak menabrak kendaraan lain, bus itu justru ditabrakkan ke tebing. Tidak ada korban jiwa pada kejadian itu, pengemudi selamat," katanya.

Setelah peristiwa itu, bus dievakuasi dengan cara ditarik oleh kendaraan lain dari lokasi kejadian. Setelah bus itu ditarik, arus lalu lintas dari kedua arah kembali normal. Sebelumnya sempat terganggu beberapa menit. (kmb38)